



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:  Bangka Pos  Babel Pos  
 Babel News  Radar Bangka  
 Rakyat Pos  Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	✓														

Bulan:

1	2	3	4	5	6
	✓				
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
													✓											

## SKPD Tidak Serius

# Tindaklanjuti LHP BPK

**PANGKALPINANG** - Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang agar lebih serius menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Babel. Apalagi, katanya, batas waktu penyelesaian laporan masih tersisa 47 hari lagi.

"LHP BPK kita terima pada tanggal 4 Februari lalu, sementara batas waktu penyelesaian ini selama 60 hari kerja, sekarang sudah tanggal 17 Februari. Itu artinya sudah 13 hari waktu terbuang, jadi waktu yang tersisa ini agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti laporan tersebut," tegas Sopian kepada Babel Pos, Rabu (17/2) kemarin, usai rapat bersama SKPD di Auditorium Inspektorat

Pangkalpinang.

Seperti diketahui bersama, kata Sopian, dalam LHP atas belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan tahun anggaran 2015 lalu, BPK telah membuat rekomendasi agar SKPD segera menindaklanjuti temuan yang ada.

Terlebih, katanya, bagi SKPD yang berhubungan dengan pengadaan lelang dan pengerjaan proyek seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.

"Makanya harapan kami jangan sampai waktu yang ditetapkan BPK, masih ada SKPD yang belum memenuhi rekomendasi itu," pinta Sopian.

Sebab jika LHP ini tidak ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ia khawatir akan menjadi temuan nantinya. Dan jika sudah menjadi temuan, katan-

ya, tentunya Kepala SKPD harus mempertanggungjawabkannya.

"Saya berharap hal itu jangan sampai terjadi, jadi dengan adanya sisa waktu ini mari kita kerjakan LHP ini dengan serius dan jangan terlena, karena semakin lama akan semakin menumpuk," imbuhnya.

Namun Mantan Camat Rangkui ini menyakini jika LHP tersebut bisa diselesaikan SKPD dengan sesuai waktu yang ditetapkan. Bahkan dia merasa optimis laporan tersebut akan selesai sebelum waktu yang ditentukan.

"Saya rasa belum sampai 60 hari sudah selesai, karena Kepala SKPD kita tahu betul kalau temuan itu tidak ditindaklanjuti, maka akan kembali ke ranah hukum, dan saya yakin tidak ada Kepala SKPD yang mau berurusan dengan hukum," pungkasnya. (pas)